

**PROSES BISNIS
PENGELOLAAN KEWILAYAHAN**

DRAFT

LEVEL 0	LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	AKTIVITAS					
1	Pengelolaan Kewilayahan	1.1 Penataan Wilayah	1.1.1 Rencana Induk Penataan Daerah	1.1.1.1 Penataan Daerah	1.1.1.1.1 Pemekaran Daerah	Pemekaran Provinsi				
						Pemekaran Kabupaten/Kota				
						Pemekaran Kecamatan				
						Pemekaran Desa				
					1.1.1.1.2 Penggabungan Daerah	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				
					1.1.1.1.3 Penyesuaian Daerah	Perubahan Batas Wilayah				
						Perubahan Nama Daerah				
						memberian Nama dan Perubahan nama bagian rupa bumi				
						Pemindahan Ibukota				
						Perubahan Nama Ibukota				
								1.1.1.2 Penataan Ruang	1.1.1.2.1 Penataan Ruang Nasional	
									1.1.1.2.2 Penataan Ruang Provinsi	
									1.1.1.2.3 Penataan Ruang Kabupaten/Kota	
						1.2 Pengembangan Wilayah	1.2.1 Rencana Induk Pengembangan Wilayah	1.2.1.1 Pengelolaan kawasan khusus	1.2.1.1.1 Kawasan Khusus	pengelolaan sistem informasi manajemen dan akuntabilitas kinerja kawasan
										1.2.1.1.2 Kawasan Kepentingan Nasional
	Sinkronisasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kawasan Khusus									
1.2.1.2 Pengelolaan Perkotaan	1.2.1.2.1 Standar Pelayanan Perkotaan									
1.2.1.3 Sinkronisasi Pembangunan Wilayah										
1.2.1.4 Kawasan Perbatasan Negara	1.2.1.4.1 Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan								
	1.2.1.4.2 Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Tata Ruang Kawasan Perbatasan								
	1.2.1.4.3 Penegasan Batas Wilayah Darat	Perundingan Batas Wilayah Negara								
		Pemeliharaan Patok batas								
	1.2.1.5 Pertanahan	1.2.1.5.1 Izin Lokasi								
		1.2.1.5.2 Pengadaan Tanah Kepentingan Umum								
		1.2.1.5.3 Sengketa Tanah Garapan								
		1.2.1.5.4 Ganti rugi dan Santunan								
		1.2.1.5.5 Subjek dan Objek Retribusi								
		1.2.1.5.6 Tanah Ulayat								
		1.2.1.5.7 Tanah Kosong								
		1.2.1.5.8 Izin Membuka tanah								
		1.2.1.5.9 Penggunaan Tanah								
	1.3 Pembinaan dan Pengawasan Kewilayahan	1.3.1 Gubernur Wakil Pemerintah Pusat	1.3.1.1 Dekonsentrasi	1.3.1.1 Pembinaan dan Pengawasan bidang Pemerintahan						
				1.3.1.2 Pembinaan dan Pengawasan bidang Hukum dan Organisasi						
				1.3.1.3 Pembinaan dan Pengawasan bidang Keuangan						
				1.3.1.4 Pembinaan dan Pengawasan bidang Perencanaan						

						1.3.1.5	Pembinaan dan Pengawasan bidang Pengawasan		
			1.3.2	Tugas Pembantuan					
					Provinsi Kabupaten/Kota Desa				
			1.3.3	Kerjasama					
					Wajib Sukarela				
	1.4	Sistem Informasi dan Data Wilayah	1.4.1	Data Toponimi	1.4.1.1	Gasetir Pulau	1.4.1.1.1	Pembakuan Nama Pulau	
					1.4.1.2	Luas wilayah Laut dan Kepulauan	1.4.1.1.2	Penamaan Pulau	
					1.4.1.3	Nama Unsur Rupabumi	1.4.1.3.1	Unsur Alami	
							1.4.1.3.2	Unsur Buatan	
							1.4.1.3.3	Unsur Warisan Budaya	
					1.4.1.4	Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan			
			1.4.2	Data Batas Daerah	1.4.2.1	Provinsi			
					1.4.2.2	Kabupaten/Kota			
					1.4.2.3	Kecamatan			
					1.4.2.4	Desa/Kelurahan			
			1.4.3	Data Pertanahan					
			1.4.4	Data Batas darat antar negara					
			1.4.5	Data Kawasan Khusus					